



Membedah *Blue Economy* di Madura Terhadap Potensi Sumber Daya Laut: Melalui Pendekatan Kajian Litelatur

Deviana Iswahyuni¹, Muhammad Isbad Addainuri²

¹Universitas Islam Negeri Madura

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding author: email: devianaiswahyuni65@gmail.com

Abstract

Keywords:

Blue Economy;
Ecotourism; Maritime
Economy.

This study aims to examine the potential for blue economy development in Madura through a literature review approach to marine and coastal resource management. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, referring to various academic sources such as scientific journals and books. The research findings indicate that Madura has abundant coastal resources such as fisheries, mangrove ecosystems, and marine tourism that have not been fully optimized. One of the superior potentials lies in the coastal tourism sector spread across various regencies such as Bangkalan, Sampang, Pamekasan, and Sumenep, which offer religious, cultural, and natural tourism days. However, this development still faces challenges such as limited infrastructure, public understanding, and synergy between parties. Therefore, a sustainable and collaborative management strategy is needed to advance the local economy, improve the welfare of coastal communities, and preserve the marine environment on Madura Island. These findings provide practical implications for local governments to formulate policies based on local potential by integrating infrastructure development, public education, and cross-sector collaboration in blue economy development.

Abstrak:

Kata Kunci:

Blue Economy;
Ekowisata; Ekonomi
Maritim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pengembangan ekonomi biru di Madura melalui pendekatan kajian pustaka terhadap pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Merujuk pada berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah dan buku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Madura memiliki sumber daya pesisir yang melimpah seperti perikanan, ekosistem mangrove, dan wisata bahari yang belum dioptimalkan sepenuhnya. Salah satu potensi unggulan terletak pada sektor wisata pesisir yang tersebar di berbagai kabupaten seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang menawarkan hari wis ata religi, budaya, dan alam. Namun pengembangan ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pemahaman masyarakat, dan sinergi antarpihak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaboratif untuk memajukan perekonomian lokal,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan melestarikan lingkungan laut di Pulau Madura. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berbasis potensi lokal dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi biru..

How to Cite: Iswahyuni, D. & Addainuri, M. I. 2025. Membedah *Blue Economy* di Madura Terhadap Potensi Sumber Daya Laut: Melalui Pendekatan Kajian Litelatur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, Vol 2 No. 2, DOI: xxxxx

Received : 31 Juli 2025 ; Revised: 20 Agustus 2025 ; Accepted: 31 Agustus 2025



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang dimana seharusnya memiliki keunggulan strategis yang bisa dioptimalkan untuk mendukung suatu pembangunan nasional. Kekayaan laut yang dimiliki baik yang berada di permukaan maupun di dasar laut menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Akan tetapi, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur di berbagai wilayah yang secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara (Ervianto, 2018).

Secara historis, manusia memiliki hubungan erat dengan laut sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Seiring dengan berkembangnya teknologi perikanan dan navigasi, laut mulai dimanfaatkan sebagai jalur migrasi dan wilayah kolonisasi. Pemanfaatan laut pun tidak terbatas pada transportasi dan perikanan saja, tetapi juga meluas hingga eksplorasi mineral di dasar laut serta teknologi lintas batas negara. Oleh karena itu, laut menjadi salah satu ekosistem yang memiliki peran penting dan luas dalam kehidupan manusia (Maeyangsari, 2023).

Pendalaman eksplorasi terhadap sektor ekonomi biru berpotensi meningkatkan produksi pangan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi. Sejak zaman dahulu, laut telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi berbagai peradaban sebagai sumber makanan. Laut menyimpan beragam sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti bahan pangan, oksigen, serta kemampuan menyerap panas dan menyimpan karbon dioksida. Selain itu, wilayah pesisir juga berperan dalam melindungi manusia dari dampak negatif perubahan iklim. Laut menyediakan sumber pangan utama, yang sebagian besar berasal dari ikan liar (marikultur), dan menyumbang sekitar 17% dari total produksi daging yang dapat dikonsumsi secara global (Andaiyani et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Haryadi (2025), masyarakat pesisir di Madura masih belum mampu memanfaatkan potensi ekonomi

biru secara optimal, meskipun mereka berada di wilayah strategis yang kaya akan sumber daya tersebut. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi: (1) keterbatasan dalam mengakses teknologi digital, (2) kurangnya pemahaman mengenai praktik akuntansi berbasis lingkungan, serta (3) minimnya pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (Haryadi et al., 2025). Bukan hanya itu saja, Dampak perubahan iklim juga memberikan pengaruh besar terhadap wilayah pesisir, menjadikannya salah satu kawasan yang paling rentan terhadap gangguan. Kenaikan suhu permukaan laut secara langsung memengaruhi kondisi ekosistem laut secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada siklus perikanan. Akibat perubahan iklim, hasil tangkapan ikan menjadi tidak stabil dan musim ikan pun berlangsung lebih singkat. Situasi ini tentu memperparah kondisi ekonomi para nelayan yang sangat bergantung pada keberlangsungan ekosistem maritim (Purwanto et al., 2023).

Pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab penting dalam rangka mewujudkan target agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat vital apabila Pemerintah Indonesia bersama komunitas internasional berkomitmen untuk bangkit dari krisis saat ini maupun di masa depan, guna menciptakan perekonomian yang lebih kokoh, masyarakat yang lebih sehat, serta komunitas yang lebih resilien (Darajati, 2023). Dengan ini, adanya pengembangan ekonomi biru di Madura menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat lokal, agar nantinya potensi besar yang dimiliki suatu wilayah ini tidak hanya menjadi narasi semata, akan tetapi mampu diwujudkan sebagai kekuatan nyata dalam mendukung dari berbagai aspek salah satunya ketahanan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan laut.

LANDASAN TEORI

Blue Economy

Ekonomi biru, yang mulai diperkenalkan pada Konferensi Rio+20 tahun 2012, merupakan bagian dari konsep ekonomi maritim yang memiliki potensi besar. Konsep ini berakar dari ekonomi hijau serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-14 tentang kehidupan di bawah laut. Ekonomi biru mendorong pembangunan berkelanjutan ekosistem laut, menciptakan peluang ekonomi baru, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kelestarian laut (Hasrullah, 2024).

Ekonomi biru merupakan bentuk ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yang pelaksanaannya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti kebijakan yang didasarkan pada data dan ilmu pengetahuan, sinergi antar sektor, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan Keputusan

(Retnosuryandari, 2024).

Terkait *blue economy*, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola kekayaan sumber daya kelautannya yang begitu melimpah. Sekitar dua pertiga wilayah negara ini—setara dengan 8,3 juta kilometer persegi—merupakan perairan. Dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia menempati posisi kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Wilayah laut yang termasuk dalam kedaulatan Indonesia mencakup 6,07 juta kilometer persegi, ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3 juta kilometer persegi. Keanekaragaman hayati laut Indonesia sangat luar biasa, dengan sekitar 8.500 spesies ikan dan 555 jenis rumput laut.

Negara ini juga menjadi habitat berbagai megafauna dan mikrofauna laut. Letaknya yang strategis di pusat segitiga terumbu karang dunia membuat Indonesia menjadi rumah bagi 950 jenis biota terumbu karang, mencakup area seluas 25.000 kilometer persegi atau 10 persen dari total dunia. Kekayaan jenis karang Indonesia mencakup 569 spesies, 82 genus, dan 15 famili, yang mewakili lebih dari 70 persen spesies karang global, lima di antaranya bersifat endemic (Damanik et al., 2023).

Prinsip-prinsip Ekonomi Biru (Blue Economy) dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memastikan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan (Perkasa et al., 2024). Penerapan konsep *Blue Economy* di Indonesia berpotensi memberikan dampak positif terhadap aspek kesejahteraan (prosperity) masyarakat lokal. Tingkat kesejahteraan ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, akses layanan kesehatan, program keluarga berencana, serta pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga.

Sebagai negara dengan keunggulan wilayah maritim, Indonesia dituntut untuk mengoptimalkan potensi kelautannya secara bijak. Kebijakan *Blue Economy* tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Dengan demikian, *Blue Economy* diharapkan mampu mendorong sirkulasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjadi jaminan bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan maritim (Dhani Akbar et al., 2022).

Ekonomi Maritim

Ekonomi maritim adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya laut, termasuk berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan pesisir dan perairan. Ruang lingkupnya mencakup beragam kegiatan, seperti perikanan, budidaya laut (aquaculture), pariwisata bahari, perdagangan dan transportasi laut, industri perkapalan, pemanfaatan energi terbarukan dari laut, hingga pembangunan infrastruktur serta penyediaan jasa

pendukung di sektor maritim (Zulkifli et al., 2023).

Ekonomi maritim adalah aktivitas perekonomian yang berlangsung di kawasan pesisir hingga wilayah laut. Bentuk kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain transportasi laut, industri perkapalan, pembangunan serta pengelolaan pelabuhan, hingga berbagai industri dan jasa yang mendukung sektor tersebut. Pada prinsipnya, aktivitas ekonomi maritim hanya dapat dijalankan oleh negara yang memiliki wilayah laut luas atau berstatus negara kepulauan, seperti halnya Indonesia. Dengan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi maritim guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir, sekaligus menarik minat investor asing. Bagi Indonesia, pengembangan ekonomi maritim juga menjadi sarana untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional serta mewujudkan cita-cita bangsa melalui visi Poros Maritim Dunia (Dhaniswari & Rakhmagina, 2022).

Pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, khususnya dalam sektor Ekonomi Maritim dan Ekonomi Pariwisata, salah satunya banyak ditopang oleh Jawa Timur. Sektor pariwisata di provinsi ini tercermin dari Tingkat Penghunan Kamar (TPK) hotel berbintang yang pada triwulan I tahun 2016 mencapai 56,07%, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 53,09%. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Bandara Juanda juga naik sebesar 6,66%, dengan mayoritas wisatawan berasal dari Malaysia (23,04%) dan Singapura (10,53%) (Sudapet et al., 2017).

Sejak awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2014, sektor kelautan dan kemaritiman menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, pembangunan yang berkeadilan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yang menempatkan pembangunan maritim sebagai salah satu fokus utama. Sejak saat itu, isu kemaritiman semakin sering digaungkan dan menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan masyarakat. Paradigma pembangunan pun mengalami pergeseran, di mana ketimpangan antara sektor daratan dan laut serta keterpurukan ekonomi mulai mendapat perhatian khusus. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menggagas konsep “Poros Maritim Dunia” dan “Tol Laut” sebagai langkah strategis untuk menata kembali laut Indonesia demi kemakmuran bangsa. Sudah sepatutnya, laut dan sektor kemaritiman dijadikan fondasi pembangunan nasional menuju tercapainya kesejahteraan Masyarakat (Ilyas et al., 2023).

Indonesia menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi maritim sebagai upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini diyakini mampu mendorong terciptanya pembangunan yang merata, dengan menjadikan transportasi laut sebagai pilar utama untuk memperkuat konektivitas

dan integrasi antarwilayah di seluruh kepulauan Indonesia (Alifa & Zahidi, 2024).

Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan di wilayah dengan lingkungan alam yang masih terjaga keasliannya, dengan tetap menghormati kekayaan budaya dan alam setempat. Konsep ini mendukung upaya pelestarian, meminimalkan dampak negatif, memberikan manfaat sosial ekonomi, serta mengedepankan peran serta masyarakat lokal. Ekowisata juga dipandang sebagai salah satu bentuk usaha atau sektor pariwisata berbasis alam yang dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Devi et al., 2022).

Ekowisata didalamnya terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu daya tarik alam maupun budaya, konservasi, edukasi, serta keterlibatan masyarakat lokal. Daya tarik yang dimaksud mencakup aktivitas wisata yang berfokus pada keindahan alam dan interaksi dengan budaya setempat. Konservasi merujuk pada upaya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk keberagaman hayati, flora, fauna, serta keaslian budaya di kawasan tersebut.

Aspek edukasi berarti ekowisata tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyajikan pengetahuan dan wawasan mengenai lingkungan serta budaya lokal. Sementara itu, partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan ekowisata. Adapun tahapan utama dalam pengembangan objek ekowisata meliputi: (1) identifikasi potensi atau kelayakan, (2) tahap pengembangan, (3) pengelolaan, (4) pemeliharaan, dan (5) pemasaran objek ekowisata (Mu'tashim & Indahsari, 2021). Selain itu ekowisata juga memiliki prinsip dalam pengembangannya,

Salah satu prinsip ekowisata yaitu: a) Prinsip Konservasi, Dalam pengembangan ekowisata, perlu adanya upaya menjaga, melindungi, sekaligus berkontribusi dalam memperbaiki sumber daya alam. Hal ini menuntut adanya kepedulian, tanggung jawab, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Prinsip konservasi terbagi menjadi dua, yaitu: (1) konservasi alam, yang menekankan perhatian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan serta pembangunan yang sesuai dengan kaidah ekologis; dan (2) konservasi budaya, yakni kepekaan dan penghargaan terhadap nilai sosial, budaya, serta tradisi keagamaan masyarakat di sekitar kawasan. b) Prinsip Partisipasi Masyarakat, Pengembangan ekowisata harus dilandasi musyawarah serta persetujuan masyarakat lokal, sekaligus menghargai nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi keagamaan yang berlaku di wilayah tersebut. c) Prinsip Ekonomi, Ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang seimbang antara pelestarian lingkungan dengan kepentingan

berbagai pihak. d) Prinsip Edukasi, Ekowisata harus mengandung unsur pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran, kepedulian, rasa tanggung jawab, serta, komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. e) Prinsip Wisata

Ekowisata juga ditujukan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian, kegiatan wisata dapat berkelanjutan sekaligus menambah wawasan serta kepuasan bagi para wisatawan (Maak et al., 2022). Ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan pariwisata yang banyak diminati karena menawarkan pengalaman berbeda, yakni keindahan alam sekaligus pembelajaran tentang lingkungan. Selain itu, ekowisata turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan membuka lapangan pekerjaan serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.

Konsep ini juga berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan dan ekologi, sehingga penting untuk terus dikembangkan agar mampu menumbuhkan kesadaran serta kepedulian wisatawan terhadap kelestarian alam (Mahardana et al., 2020). Dengan demikian, ekowisata dapat menjadi jembatan untuk menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia, kelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep ekonomi biru dan potensinya terhadap pengelolaan sumber daya laut di wilayah Madura. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025 dengan mengandalkan data sekunder. Literatur yang digunakan mencakup kajian teoritis maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas isu-isu terkait *Blue Economy*, Ekonomi maritim, Ekowisata, Pariwisata pesisir dimadura dan Pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir.

Literature review merupakan proses pemilihan dan pengkajian berbagai dokumen terkait suatu topik yang memuat informasi, gagasan, data, serta bukti yang disusun dari sudut pandang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu atau menyampaikan perspektif tertentu mengenai topik yang dibahas. Kajian ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana suatu isu akan diteliti, dianalisis, dan dievaluasi secara sistematis dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, literature review dapat dipahami sebagai uraian, rangkuman, sekaligus evaluasi kritis terhadap suatu topik berdasarkan sumber-sumber literatur, baik berupa buku serta jurnal (Nugraha, 2024).

Metode kualitatif deskriptif adalah rancangan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dasar seperti siapa, apa, dan kapan suatu fenomena atau pengalaman terjadi. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai suatu fenomena, namun tidak menyajikan data yang bersifat mendalam (

et al., 2019). Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada penyajian deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang dikaji, sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman awal bagi peneliti maupun pembaca. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran konsep ekonomi biru terhadap pengelolaan sumber daya laut di Madura serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun rekomendasi kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Pesisir Di Madura

Kegiatan budidaya umumnya terkonsentrasi di daerah pesisir. Selain itu, wilayah ini memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan pesat sektor jasa lingkungan seperti transportasi, industri, dan pariwisata. Akibatnya, kawasan pesisir berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi di Indonesia (Hidayah & Suharyo, 2018).

Potensi pengembangan wisata pesisir di Madura terbagi ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur utara dan selatan. Kedua jalur ini, yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis syariah. Di kawasan pantai utara Kabupaten Bangkalan, salah satu lokasi yang banyak diminati untuk liburan keluarga adalah wisata mangrove di Labuhan, Kecamatan Sepulu. Selain itu, terdapat pula sejumlah pantai kecil di Kecamatan Tanjung Bumi dan Bangkalan. Sementara di bagian selatan, destinasi wisata tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Kamal, Kwanyar, dan Labang (Nasrulloh et al., 2023).

Dimana kabupaten bangkalan merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Jawa Timur dan banyak diminati oleh para pelancong. Setidaknya terdapat sekitar 20 objek wisata yang tersebar di wilayah ini. Dari berbagai jenis wisata yang tersedia, wisata religi menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Hal ini didukung oleh keberadaan makam para ulama ternama, seperti Pasarean Syaichona Cholil dan Pasarean Aer Mata Ebhu. Selain itu, Bangkalan juga menawarkan wisata sejarah, termasuk museum, mercusuar, serta situs benteng peninggalan kolonial. Tak hanya itu, terdapat pula sentra industri batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi yang turut menarik perhatian wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara (Nugroho & Adiyanto, 2023).

Adapun pariwisata di sampang Salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah Pantai Camplong yang berada di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang sendiri terletak di Pulau Madura dan berada di jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Sampang terdiri atas empat jenis kawasan, yaitu wilayah pesisir, kepulauan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Selain itu, Kabupaten Sampang juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang mendukung perkembangan sektor pariwisata. Pantai Camplong menjadi salah satu objek wisata unggulan yang paling banyak menarik kunjungan wisatawan, baik dari daerah setempat maupun dari luar wilayah (Anam et al., 2022).

Kemudian pada Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari. Desa ini memiliki pantai yang indah, hutan mangrove yang luas, serta keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian, yaitu Pokdarwis Sabuk Hijau, karang taruna Desa Lembung, BUMDes Sumber Rezeki, dan Pemerintah Desa Lembung (Darmawan et al., 2025). Selain itu pada Pengembangan daya tarik wisata Pantai 9 di Sumenep merupakan bagian penting dari Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, yang salah satunya menekankan pada penerapan konsep pariwisata berkelanjutan.

Di sekitar kawasan Pantai 9, terdapat berbagai sumber daya pesisir laut seperti panorama laut, ikan hias, terumbu karang, dan padang lamun. Salah satu keunikan pantai-pantai di Indonesia adalah lanskapnya yang indah dan khas. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki Pantai 9 sangat layak untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, apalagi mengingat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Madura (Mada et al., 2018). Dengan berbagai potensi wisata yang dimiliki masing-masing wilayah di Madura, mulai dari keindahan alam pesisir, kekayaan budaya, hingga nilai-nilai religi yang melekat kuat dalam masyarakat, maka pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses untuk menumbuhkan kesadaran, meningkatkan kemampuan, serta mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga dapat dikembangkan secara mandiri. Kemandirian yang tercipta dari proses tersebut memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan permukiman dan infrastruktur wilayah, sektor informal, sosial budaya, pendidikan, maupun pembangunan daerah sebagai bagian penting dari program pemerintah (Ramdhani & Rahaju, 2022).

Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan atau meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu bertindak sesuai dengan martabatnya, sekaligus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas sosial. Dalam pengembangannya, terdapat lima prinsip utama yang menjadi dasar konsep pemberdayaan. Pelaksanaan program pemberdayaan sangat membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat.

Kerja sama yang terjalin secara harmonis, seimbang, dan saling memberikan manfaat akan mendukung kelestarian serta keberlanjutan program pembangunan demi tercapainya kesejahteraan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama dalam merealisasikan rencana pengembangan Masyarakat (Sonia & Susilawati, 2022).

Undang-Undang Desa tahun 2014 mengusung prinsip pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses atau upaya untuk memberikan daya, kekuatan, maupun kemampuan kepada individu atau kelompok masyarakat yang masih lemah, sehingga mereka mampu mengenali, menganalisis, serta menentukan kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, masyarakat juga diarahkan untuk memilih alternatif solusi dengan cara mengoptimalkan sumber daya serta potensi yang dimiliki secara mandiri (Sulandjari & Sari, 2021).

Mengingat kompleksitas persoalan yang ada, diperlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki wilayah pesisir. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) sendiri merupakan sebuah proses dinamis yang secara berkesinambungan berperan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan, perlindungan, serta pengembangan wilayah laut dan sumber daya perairan (Dewanti et al., 2023). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan pesisir sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan di masa depan. Tidak hanya itu, pengelolaan wilayah pesisir

yang tepat juga akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi bagi masyarakat pesisir secara langsung.

Apabila dilakukan secara konsisten, PWPT mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi ekosistem pesisir dari ancaman kerusakan. Oleh karena itu, komitmen bersama menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang berdaya guna sekaligus berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengembangan ekonomi biru di Madura merupakan strategi potensial untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa Madura memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan pesisir yang besar, mulai dari perikanan, hutan mangrove, hingga potensi wisata bahari dan religi. Hasil kajian juga menegaskan bahwa sektor pariwisata pesisir menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ekonomi biru di Madura. Wilayah seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki keunggulan geografis dan kekayaan budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur pendukung, memperkuat literasi masyarakat pesisir tentang ekonomi biru, serta mendorong sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Dengan demikian, strategi kebijakan yang terarah dapat mempercepat transformasi Madura sebagai pusat pengembangan ekonomi biru yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing..

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), 48–65. <https://doi.org/10.52318/jisip.2024.v38.1.4>
- Anam, S., Aristin, R., & Rudiyanto, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Mengembangkan Destinasi Wisata Pantai Di Desa Camplong Kabupaten Sampang. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 2828–6863.
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i1.324>
- Damanik, R., Noor, R., Muliawan, I., Arman, & Saragih, M. (2023). *Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045*.

- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 41–53. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/599>
- Darmawan, A. K. D., Hadi, S., Muqaddas, Z., Ferdiansyah, D., Ariyanto, F., & Wahyurini, E. T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Tata Kelola Wisata Bahari Berbasis Digital di Desa Lembung, Kabupaten Pamekasan. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 9(1), 21–32. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2025.v9i1.6613>
- Devi, E., Putri, H., Yulianto, A., Wardani, D. M., & Edi, L. (2022). *Dampak Ekonomi , Sosial dan Lingkungan Terhadap Ekowisata Berbasis Masyarakat*. 27(3), 317–327.
- Dewanti, T. T., Harsen, F., Apsari, N. C., Raharjo, S. T., Taftazani, B. M., & Santoso, M. B. (2023). *JAGA PESISIR KITA : PENGELOLAAN POTENSI LINGKUNGAN PESISIR MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PANGEMPANG ,.* 43–52.
- Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, & Nadya Triyana. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166–177. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.8>
- Dhaniswari, A. M., & Rakhmagina, N. (2022). Tantangan Dari Visi “Poros Maritim Dunia” Dalam Rangka Meningkatkan Laju Ekonomi Maritim Di Indonesia. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 33–42.
- Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru untuk Infrastruktur di Indonesia. *Umj*, 1–7.
- Haryadi, B., Leniwati, D., Rimadhani, M., Angraini, M. S., & Malang, U. N. (2025). *Penguatan Ekonomi Biru Melalui Digitalisasi dalam Perspektif Akuntansi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir*. 1, 1–11.
- Hasrullah, H. (2024). Potensi Industri Kreatif Dalam Mendiversifikasi Ekonomi Biru di Kepulauan Riau: Analisis Eksploratif. *Jurnal Archipelago*, 3(01), 83–98. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.111>
- Hidayah, Z., & Suharyo, O. S. (2018). Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura. *Rekayasa*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v11i1.4120>
- Ilyas, Tajuddin, Nur, S., Muslim, C., & Isalman. (2023). Reduksi Kemiskinan dengan Mengoptimalkan Digitalisasi Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Economics Development Issues*, 6(1), 18–24. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.153>
- Limilia, P., & Aristi, N. (2019). Literasi Media dan Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Jurnal Komunikatif*, 8(2), 205–222. <https://doi.org/10.33508/jk.v8i2.2199>

- Maak, C. S., Prudensiana, M., Muga, L., Kiak, N. T., & Cendana, U. N. (2022). *Strategi Pengembangan Ekowisata Terhadap Ekonomi Lokal Pada Desa Wisata Fatumnasi*. 6(2).
- Mada, Prasetya, Y., Rakhmawati, Rum, & Mokh. (2018). Desain Model dan Strategi Keberlanjutan Wisata Pantai 9 Pulau Giligenting, Sumenep, Madura. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 0(0000), 194–203.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106–126. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/172>
- Mahardana, D. G., Zulkifli, D., & Sabariyah, N. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PROVINSI BALI Tiga perempat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah terpanjang di dunia (Wahid , 2018). Dari data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (2017) besar . *Sumberdaya*. 2(2), 93–100.
- Mu'tashim, M. R., & Indahsari, K. (2021). *Pengembangan Ekowisata di Indonesia 1 st E-proceeding SENRIABDI 2021*. 1(1), 295–308.
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. (2023). Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Peranan Bank Syariah. *Muslim Heritage*, 8(1), 79–102. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.4989>
- Nugraha, D. A. W. (2024). Metode Penelitian. (Padang: CV. Gita Lentera), 5, 23.
- Nugroho, R. Y. Y., & Adiyanto, M. R. (2023). Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(1), 13. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.12285>
- Perkasa, D. H., Kamil, I., Ariani, M., Komarudin, K., & Abdullah, M. A. F. (2024). Pemberdayaan SDM Masyarakat di Pulau Tidung dalam Pemahaman Blue Economy. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 103–108. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v7i1.3687>
- Purwanto, E., Dasion, A. G. R., & Ayu, M. D. (2023). *Habitus Dan Resiliensi Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Desa Pasongsongan, Sumenep Madura*. 4(2), 284–298.
- Ramdhani, D. S., & Rahaju, T. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (STUDI PADA KOMUNITAS BANK SAMPAH BINTANG MANGROVE KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA). *Publika*, 10(3).
- Retnosuryandari. (2024). Ekonomi Biru. *Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM*, 1. <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-biru/#:~:text=Konsep dan Sejarah Ekonomi Biru,ekonomi biru%2C,perbaikan kehidupan masyarakat%2C serta kesehatan ekosistem laut.>
- Sonia, P., & Susilawati. (2022). LITERATURE REVIEW: PERAN PEMERINTAH

DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR.
Syntax Admiration, 3(7).

- Sudapet, I. N., Sukoco, A., & Setiawan, M. I. (2017). Model Integrasi Ekonomi Maritim Dan Pariwisata Di Daerah Guna Peningkatan Ekonomi Indonesia Timur. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(1), 140. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i1.122>
- Sulandjari, K., & Sari, D. A. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Pengolahan Buah Mangrove Sebagai Sumber Pendapatan Alternatif Masyarakat Pesisir Karawang*. 07(September), 1087–1096.
- Zulkifli, Nurjannah, I., Usman, & Mokodompit, E. A. (2023). Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim. *OSF Preprints*, 1–15. <https://osf.io/nps2v>